

IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA PT SAPTAWIRA ADHITAMA TOUR & TRAVEL

Stefanus Ariyanto; Kartika Wijaya

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Nusantara
Jl. K.H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480
sariyanto@binus.edu

ABSTRAK

Mulai tahun 2011, setiap entitas tanpa akuntabilitas publik diberikan pilihan menggunakan PSAK umum atau SAK ETAP. Sekali entitas memilih PSAK Umum maka tidak dapat merevisinya kembali. Oleh karena adanya isu strategis ini, maka entitas tanpa akuntabilitas publik yang sudah menerapkan PSAK Umum perlu mempertimbangkannya kembali dengan cermat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun panduan implementasi SAK ETAP bagi entitas yang ingin menerapkan standar tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatory yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari PT Saptawira Adhitama Tour & Travel yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik dan bergerak dalam industri jasa perjalanan wisata. Selama ini perusahaan menyusun laporan keuangan hanya untuk pihak internal dan pihak IATA dalam memenuhi kewajiban pelaporan afiliasi. Standar yang diikuti dalam menyusun laporan keuangan adalah campuran antara PSAK Umum dan non PSAK. Setelah mengimplementasikan SAK ETAP pada perusahaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menerapkan SAK ETAP terdapat beberapa langkah yang harus diikuti entitas seperti; penyusunan neraca awal dengan mengakui dan tidak mengakui pos-pos Aset dan Kewajiban yang dipersyaratkan dalam SAK ETAP, mereklasifikasikan pos-pos yang diakui sebagai suatu jenis Aset, Kewajiban, dan komponen Ekuitas berdasarkan SAK ETAP dan menerapkan SAK ETAP dalam pengukuran seluruh Aset dan Kewajiban yang diakui Terdapat beberapa perbedaan dalam proses pencatatan akuntansi sebelum dan sesudah menggunakan SAK ETAP. Prinsip-prinsip akuntansi yang sudah sesuai dengan SAK ETAP harus dilanjutkan secara konsisten.

Kata kunci: Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Implementasi SAK ETAP, Pelaporan Keuangan

ABSTRACT

In 2011, entities without significant public accountability have a choice to implement Indonesian generally accepted accounting principles (PSAK) that has been converge with International Financial Reporting Standards (IFRS) or PSAK for small medium enterprise called SAK ETAP. The choice become crucial because entities that choose to implement PSAK, can not change the decision to use SAK ETAP. The purpose of this research is to prepare implementation guidelines that can be used by small medium enterprise in implementing the standards. The methods used are qualitative descriptive and literature review. The sample company in this research is PT Saptawira Adhitama Tours & Travel (Sapta Tours) that meet the criteria of small medium enterprise that previously using mixed standard in preparing it's financial statements. The steps that must be followed by entity to implement SAK ETAP are : prepare opening balance sheet that recognize or derecognize accounts as required by SAK ETAP, reclassification of accounts recognize as Assets, Liabilities and Equity Components, and apply all measurements required by the standard. All paragraph in the standards should be implemented consistently.

Keywords: Entity without public accountability, financial reporting, SAK ETAP Implementation

PENDAHULUAN

Pada 1 Januari 2011, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK ETAP) telah dinyatakan efektif berlaku untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Entitas yang dapat menggunakan SAK ETAP adalah yang memenuhi dua kriteria yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) bagi pengguna eksternal. Pada umumnya, entitas tanpa akuntabilitas publik adalah perusahaan mikro, kecil dan menengah (UMKM) sehingga pengguna ETAP akan banyak terdiri dari entitas dengan kategori UMKM.

Mulai tahun 2011, setiap entitas tanpa akuntabilitas publik diberikan pilihan apakah akan menggunakan PSAK umum atau SAK ETAP. Apabila pada tahun 2011 suatu entitas tanpa akuntabilitas publik telah menetapkan untuk menggunakan PSAK umum, maka entitas tersebut setelah tahun 2011 tidak boleh merevisi kebijakan akuntansinya dengan menggunakan SAK ETAP. Oleh karena adanya kebijakan tidak boleh merevisi menjadi SAK ETAP, maka tahun 2011 ini menjadi tahun yang sangat menentukan dan bersifat strategis bagi pengambilan keputusan mengenai Standar Akuntansi Keuangan yang akan digunakan.

Memahami bahwa penerapan SAK ETAP menyangkut isu strategis, maka perusahaan-perusahaan tanpa akuntabilitas publik yang sudah ada saat ini dan menerapkan PSAK Umum, perlu mempertimbangkan dengan cermat mengenai apakah akan menerapkan SAK ETAP atau tetap dengan PSAK Umum. Suatu kajian yang cermat perlu dilakukan sebelum mengambil keputusan dan perlu mempertimbangkan dampak penyesuaian yang diperlukan atas laporan keuangannya. Sebaliknya, bagi perusahaan yang akan tetap menerapkan PSAK Umum, perlu mempertimbangkan secara cermat agar tidak menyesal di kemudian hari. Sekali perusahaan telah menerapkan PSAK umum pada tahun 2011, maka tidak ada lagi peluang untuk mengubahnya kepada SAK ETAP.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT Saptawira Adhitama Tour & Travel sebagai perusahaan tanpa akuntabilitas publik yang bergerak di bidang jasa pariwisata. PT Saptawira Adhitama Tour & Travel menggunaksan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, namun belum diterapkan secara keseluruhan. Oleh karena itu, laporan keuangannya hanya dapat digunakan oleh pihak internal perusahaan. Dengan menerapkan SAK ETAP, diharapkan perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan untuk pihak internal dan eksternal perusahaan. SAK ETAP begitu penting untuk dibahas agar banyak pihak membuka mata untuk mulai mencoba menerapkan SAK ETAP dalam perusahaannya.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) untuk mengimplementasikan SAK ETAP sebagai standar penyusunan laporan keuangan perusahaan PT Saptawira Adhitama Tour & Travel; (2) untuk mengevaluasi pengaruh implementasi SAK ETAP pada laporan keuangan perusahaan PT Saptawira Adhitama Tour & Travel. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: (1) membantu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan; (2) mengevaluasi pengaruh dari mengimplementasikan SAK ETAP pada UMKM atau entitas tanpa akuntabilitas publik; dan (3) mengetahui aspek-aspek implementasi SAK ETAP secara nyata dan langkah-langkah dalam menyusun laporan keuangan.

METODE

Jenis dari risetnya adalah riset eksploratoria. Dimensi waktu riset adalah melibatkan urutan waktu selama 2 tahun. Kedalaman risetnya berupa studi kasus dan studi literature. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung yaitu secara langsung berupa wawancara, pembagian kuesioner, dan secara tidak langsung berupa data arsip. Lingkungan penelitian

yang dilakukan adalah lingkungan *non-contived setting* atau lingkungan riil. Unit analisisnya adalah sebuah perusahaan menengah di bidang jasa biro perjalanan wisata. Metode pengumpulan data adalah melalui wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fase Peralihan SAK ETAP

Dalam SAK ETAP dijelaskan bahwa entitas yang menerapkan secara prospektif dan sebelumnya telah menyusun laporan keuangan perlu melakukan langkah-langkah seperti: (1) mengakui dan tidak mengakui pos-pos Aset dan Kewajiban yang dipersyaratkan dalam SAK ETAP; (2) mereklasifikasikan pos-pos yang diakui sebagai suatu jenis Aset, Kewajiban, dan komponen Ekuitas berdasarkan SAK ETAP; dan (3) menerapkan SAK ETAP dalam pengukuran seluruh Aset dan Kewajiban yang diakui.

PT Saptawira Adhitama menerapkan SAK ETAP secara dini. Dalam SAK ETAP dijelaskan jika entitas menerapkan secara dini, maka harus menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010. Ada tiga aspek utama yang terkait dengan laporan keuangan suatu perusahaan yaitu pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Ketiga aspek ini perlu dikaji ulang sebelum perusahaan menerapkan SAK ETAP secara prospektif.

Pengakuan dalam Membuat Neraca Awal Perusahaan

Entitas perlu membuat Neraca Awal untuk memulai penerapan SAK ETAP secara prospektif. Dalam membuat Neraca Awal, entitas perlu melakukan langkah pertama dan kedua yang telah disebutkan diatas.

Mengakui dan tidak mengakui pos-pos Aset dan Kewajiban yang dipersyaratkan dalam SAK ETAP

Aset yang harus diakui oleh PT Saptawira Adhitama adalah aset tetap dan aset tidak berwujud. Aset Tetap perusahaan diperoleh dari kepemilikan langsung dan dari sewa (*leasing*). Aset Tetap yang diperoleh dari sewa, perlu dikaji ulang klasifikasinya. Jika sewa merupakan sewa pembiayaan (*finance lease*), maka aset tetap tersebut perlu diakui dalam laporan keuangan perusahaan sejak dari awal perolehan aset tetap tersebut dan disusutkan seperti aset tetap lain yang diperoleh secara langsung. Sewa yang dilakukan oleh PT Saptawira Adhitama merupakan sewa pembiayaan karena telah memenuhi salah satu syarat dari pengakuan sewa pembiayaan. Salah satu syarat yang terpenuhi adalah perusahaan dapat memiliki aset tetap dari sewa pembiayaan pada akhir masa sewa. Oleh karena itu perusahaan mengakui sebagai sewa pembiayaan dan aset tetap perusahaan beserta penyusutannya telah diakui dalam laporan keuangan.

Aset tidak berwujud berupa program atau *software* yang bernama Travel Assist. Program ini merupakan program khusus yang digunakan dalam membantu proses bisnis dari PT Saptawira dan beberapa perusahaan lain yang bergerak di bidang industri jasa pariwisata seperti PT Saptawira. Program Travel Assist ini belum diakui sebagai aset oleh PT Saptawira pada laporan keuangan sebelumnya karena merupakan pemberian secara cuma-cuma dari perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (*related parties*). Namun demikian, dalam SAK ETAP dijelaskan bahwa aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Penyesuaian atas pengakuan Aset Tidak Berwujud ini dimasukkan ke pos Saldo Laba karena aset diperoleh tanpa pengeluaran sumber daya perusahaan.

Oleh karena adanya pengakuan Aset Tidak Berwujud pada akhir tahun 2009, maka perlu adanya pengakuan atas amortisasi dari aset tersebut pada tahun 2010. Amortisasi diakui sebagai Beban Amortisasi pada laporan laba rugi perusahaan dan mengurangi nilai Aset Tidak Berwujud pada Neraca. Beban Amortisasi ini juga mempengaruhi Laporan Arus Kas Perusahaan karena perlakuannya sama seperti penyusutan yang bukan merupakan pengeluaran kas perusahaan.

Kewajiban yang harus diakui dan tidak diakui oleh PT Saptawira Adhitama adalah: Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang harus diakui PT Saptawira dari pencatatan penerimaan pembayaran atas jasa yang belum diberikan. Pendapatan jasa yang telah diterima pembayarannya sebelum jasa tersebut diberikan harus diakui sebagai kewajiban perusahaan. Jadi pada saat akhir tahun atau tanggal neraca, pendapatan jasa yang belum direalisasi tetapi sudah diterima pembayarannya dicatat sebagai Pendapatan Diterima Dimuka.

Hutang Usaha perlu disesuaikan karena terdapat pencatatan pada PT Saptawira sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pariwisata dengan mendebit pos Harga Pokok Penjualan dan mengkredit pos Hutang Usaha saat diakuiinya pendapatan, yaitu:

| | |
|----------------------------|------|
| Kas | (Dr) |
| Pendapatan Usaha | (Cr) |
| Harga Pokok Penjualan (Dr) | |
| Hutang Usaha | (Cr) |

Penyesuaian pada pos Pendapatan Diterima Dimuka dalam Neraca berhubungan dengan penyesuaian pos Pendapatan dalam Laporan Laba Rugi. Penyesuaian pada pos Hutang Usaha dalam Neraca berhubungan dengan penyesuaian pos Harga Pokok Penjualan dalam Laporan Laba Rugi.

Mereklasifikasikan pos-pos yang diakui sebagai suatu jenis Aset, Kewajiban, dan komponen Ekuitas berdasarkan SAK ETAP

Aset yang perlu direklasifikasikan kembali oleh PT Saptawira Adhitama adalah Aset lancar berupa Piutang Usaha. Piutang Usaha perlu diklasifikasikan ulang karena di dalam pos piutang usaha terdapat piutang antara perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related parties*). Pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa disini adalah yang memiliki hubungan dengan pegawai PT Saptawira Adhitama. Piutang dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa harus disajikan dalam pos yang terpisah dari piutang usaha.

Dalam Transaksi perusahaan, terdapat pencatatan hutang pajak yang tidak sesuai dengan standar akuntansi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan mencatat Hutang PPN yang timbul dari penjualan jasa tiket dengan jurnal:

| | |
|-----------------------------|------|
| Kas / Piutang Usaha | (Dr) |
| Pendapatan (PPN) | (Cr) |
| Pendapatan Usaha | (Cr) |
| Harga Pokok Penjualan | (Dr) |
| Harga Pokok Penjualan (PPN) | (Dr) |
| PPN Masukan | (Cr) |
| Hutang Usaha | (Cr) |

Jika perusahaan mencatat Hutang (PPN) dengan mengkreditkan Pendapatan (PPN) dan mendebit Harga Pokok Penjualan (PPN), akan menimbulkan adanya nilai atau angka pada Pendapatan (PPN) dan Harga Pokok Penjualan (PPN). Walaupun terjadi persilangan antara kedua pos akun

tersebut sehingga menyebabkan kedua pos tersebut bersaldo nol pada Laporan Laba Rugi, tetapi akan mempengaruhi pengambilan keputusan para pemegang kepentingan yang membaca laporan keuangan perusahaan tersebut.

Para pembaca laporan keuangan akan melihat pendapatan semu dari adanya nilai pada pos pendapatan (PPN), sehingga pendapatan perusahaan terlihat besar dan ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Seharusnya pencatatan atas Hutang PPN adalah:

| | | |
|---------------------|------|------|
| Kas / Piutang Usaha | (Dr) | |
| Pendapatan Usaha | | (Cr) |
| Hutang (PPN) | | (Cr) |

Sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan mengeluarkan Pendapatan (PPN) dari pos Pendapatan usaha dan mengeluarkan Harga Pokok Penjualan (PPN) dari pos Harga Pokok Penjualan di Laporan Laba Rugi perusahaan.

Pos Laba Ditahan merupakan komponen ekuitas yang perlu dilakukan penyesuaian sebagai akibat adanya penyesuaian dari pengakuan Aset, Kewajiban, Pendapatan dan Beban. Dalam SAK ETAP dijelaskan bahwa hasil penyesuaian yang muncul dari transaksi, kejadian, atau kondisi lainnya sebelum tanggal efektif SAK ETAP, diakui secara langsung pada saldo laba pada tanggal penerapan SAK ETAP. Oleh karena itu, penyesuaian yang terjadi pada tahun 2009 diakui secara langsung pada saldo laba pada tanggal penerapan yaitu di neraca awal tahun 2010.

Menerapkan SAK ETAP dalam pengukuran seluruh Aset dan Kewajiban yang diakui

Pengukuran Terhadap Aset

Aset Lancar berupa Piutang Hubungan Istimewa. Saldo piutang dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa yang ada di buku besar pembantu saat tanggal neraca perlu dikeluarkan dari pos Piutang Usaha. Pada PT Saptawira, piutang hubungan istimewa disini merupakan piutang dari pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan para karyawan perusahaan. Terdapat saldo piutang sebesar 864.863.310 dengan pihak tersebut.

Jurnal Penyesuaian pada 31 Desember 2009:

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Piutang Hubungan Istimewa | Rp 864.863.310 | |
| Piutang Usaha | | Rp 864.863.310 |

Aset Tetap yang diperoleh dari sewa pembiayaan (*finance lease*) disusutkan seperti aset tetap yang diperoleh dari kepemilikan secara langsung. Metode penyusutan aset tetap yang digunakan perusahaan adalah saldo menurun berganda (*double declining balance*) dengan masa manfaat disesuaikan dengan penggolongan yang diatur dalam perpajakan.

Dalam SAK ETAP dijelaskan bahwa umur manfaat dari aset tetap perusahaan dapat ditetapkan secara estimasi, maka perusahaan dapat menggunakan umur manfaat yang ditentukan oleh perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, tidak diperlukan penyesuaian dalam menentukan ulang umur manfaat dan penggunaan metode penyusutan aset tetap perusahaan.

Aset Tidak Berwujud berupa program Travel Assist ini diberikan dalam bentuk hibah dari perusahaan PT Cemara Agung Lestari sebagai perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (*related parties*), sehingga tidak memiliki harga atau biaya perolehan awal.

Dalam SAK ETAP telah dijelaskan bahwa jika tidak ada harga perolehan awal, maka pengukurannya dapat menggunakan harga atau nilai wajar (*fair value*) pada saat pengakuan Aset Tidak Berwujud tersebut. Nilai wajar aset menurut SAK ETAP adalah jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Nilai wajar dari Travel Assist dengan pengguna lebih dari 20 orang adalah sebesar \$18,000 (www.travelassist-online.com). Ketentuan transaksi yang menggunakan mata uang asing dalam SAK ETAP adalah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi atau pengakuan. Sehingga, kurs yang digunakan adalah kurs pada tanggal pengakuan 31 Desember 2009 yaitu Rp 9.036,-.

| | |
|--|----------------|
| Jumlah penyesuaian pada 31 Desember 2009: | |
| Aset Tidak Berwujud | Rp 162.648.000 |
| Saldo Laba | Rp 162.648.000 |

Pengukuran Terhadap Kewajiban

Hutang Usaha perlu disesuaikan sebagai akibat adanya penyesuaian Harga Pokok Penjualan pada tanggal neraca. Hutang Usaha yang perlu disesuaikan adalah senilai Rp 2.209.373.151.

| | |
|--|------------------|
| Jumlah Penyesuaian pada 31 Desember 2009: | |
| Hutang Usaha | Rp 2.209.373.151 |
| Harga Pokok Penjualan | Rp 2.209.373.151 |

Pendapatan Diterima Dimuka yang perlu disesuaikan sebagai akibat adanya pendapatan yang belum memenuhi syarat pengakuan pendapatan senilai Rp 2.304.071.927.

| | |
|--|------------------|
| Jumlah Penyesuaian pada 31 Desember 2009: | |
| Pendapatan Diterima Dimuka | Rp 2.304.071.927 |
| Pendapatan Usaha | Rp 2.304.071.927 |

Menerapkan SAK ETAP dalam pengukuran Ekuitas

Komponen Ekuitas dalam neraca perusahaan akan ikut terpengaruh dikarenakan adanya penyesuaian komponen laporan keuangan tahun 2009 sebelum tanggal penerapan SAK ETAP. Komponen Ekuitas yang terpengaruh secara signifikan adalah pos Saldo Laba. Pos Saldo Laba terpengaruh sebagai akibat adanya penyesuaian terhadap pendapatan usaha, harga pokok penjualan, penyesuaian akibat pengakuan aset, dan penyesuaian pajak penghasilan akibat perubahan laba kena pajak.

Pos Pendapatan Usaha yang dilakukan penyesuaian adalah: (1) pendapatan yang belum memenuhi kriteria pendapatan sehingga harus dikeluarkan dari Pendapatan Usaha di Laporan Laba Rugi dan dimasukkan ke dalam pos Pendapatan Diterima Dimuka sebagai kewajiban di Neraca; (2) Pendapatan yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yaitu pendapatan (PPN). Pendapatan (PPN) harus dikeluarkan dari pos Pendapatan Usaha. Pendapatan (PPN) yang harus dikeluarkan senilai Rp 138.080.000.

Pos Harga Pokok Penjualan yang dilakukan penyesuaian adalah: (1) Harga Pokok Penjualan di Laporan Laba Rugi dan Hutang Usaha di Neraca yang harus disesuaikan sebagai akibat dari penyesuaian Pendapatan Usaha; dan (2) Harga Pokok Penjualan (PPN) yang tidak boleh diakui sehingga dikeluarkan dari Harga Pokok Penjualan (PPN). Harga Pokok Penjualan (PPN) yang harus dikeluarkan senilai Rp 138.080.000.

Penyesuaian akibat pengakuan aset adanya pengakuan Aset Tidak Berwujud pada akhir tahun 2009 senilai Rp 162.648.000 yang menyebabkan Saldo laba perusahaan bertambah.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak perusahaan berubah akibat adanya penyesuaian Pendapatan Usaha dan Harga Pokok Penjualan. Perubahan Laba (Rugi) Sebelum Pajak mengakibatkan perubahan pajak penghasilan terutang perusahaan. Pajak terutang mengalami penurunan sebesar Rp 26.515.720, dari Rp 30.124.080 menjadi Rp 3.608.360 sebagai akibat penurunan Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan. Oleh karena itu, selisih pajak terutang ini perlu dimasukkan dalam pos Saldo Laba.

Pencatatan Transaksi Bisnis Perusahaan Untuk Tahun Berikutnya

Pada masa penerapan SAK ETAP untuk tahun berikutnya, terdapat beberapa perubahan pencatatan yang dilakukan perusahaan. Perubahan pencatatan tersebut (khususnya tahun 2010 sebagai tahun penerapan SAK ETAP pertama kali) akan dibahas pada subbab ini. Pencatatan yang tidak dibahas dalam subbab ini merupakan pencatatan yang telah sesuai dengan SAK ETAP tanpa perlu adanya perubahan.

Pencatatan Penerimaan Pendapatan Usaha

Dalam transaksi penjualan jasa ke pelanggan di tahun 2010, perusahaan mencatat dengan jurnal:

| | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| Piutang Usaha | | (Dr) | |
| | Pendapatan Usaha | | (Cr) |
| | Hutang PPN | | (Cr) |
| | Harga Pokok Penjualan | | (Dr) |
| | Hutang Usaha | | (Cr) |

Jika pelanggan telah melakukan pembayaran secara tunai atas jasa yang dibelinya, tetapi jasa tersebut belum selesai diberikan oleh perusahaan, maka perusahaan harus mencatatnya sebagai kewajiban dengan jurnal:

| | | |
|------------|-----------------------------------|-------------|
| Kas | | (Dr) |
| | Pendapatan Diterima Dimuka | (Cr) |
| | Hutang PPN | (Cr) |

Setelah perusahaan selesai memberikan jasa kepada pelanggan, maka kewajiban tersebut dibalik dan masuk ke dalam pos Pendapatan Usaha. Perusahaan baru dapat mencatat Hutang Usaha dan Harga Pokok Penjualan dari jasa yang diberikan tersebut. Jurnal Pencatatannya adalah sebagai berikut:

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Pendapatan Diterima Dimuka | | (Dr) | |
| | Pendapatan Usaha | | (Cr) |
| Harga Pokok Penjualan | | (Dr) | |
| | Hutang Usaha | | (Cr) |

Oleh karena itu, pada tanggal neraca yaitu 31 Desember 2010 akan terdapat pos Pendapatan Diterima Dimuka yang belum dibalik dan masuk ke dalam pos Pendapatan Usaha karena masih terdapat jasa yang belum selesai diberikan tetapi telah menerima pembayarannya.

Pencatatan Piutang Usaha yang Memiliki Hubungan Istimewa

Pencatatan Piutang Usaha perusahaan pada tahun 2010, telah dipisahkan dengan piutang usaha dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Perusahaan akan mencatat ke dalam pos Piutang Hubungan Istimewa jika terjadi transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan, seperti komisaris, direktur, dan pegawai lain yang bekerja pada perusahaan.

Jurnal pencatatannya adalah sebagai berikut:

| | | |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|
| Piutang Hubungan Istimewa | (Dr) | |
| | | Pendapatan Usaha |
| | | (Cr) |
| | | Hutang PPN |
| | | (Cr) |
| Harga Pokok Penjualan | | (Dr) |
| | | Hutang Usaha |
| | | (Cr) |

Pada saat pihak istimewa tersebut melakukan pembayaran atas piutangnya, pos Piutang Hubungan Istimewa yang di jurnal balik (dikreditkan).

Pencatatan Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Sebagai akibat adanya pengakuan Aset Tidak Berwujud pada tahun 2009, maka terdapat amortisasi dari aset tersebut di tahun 2010. Di dalam SAK ETAP dijelaskan bahwa semua aset tidak berwujud dianggap mempunyai umur manfaat yang terbatas dan dianggap 10 tahun jika entitas tidak mampu mengestimasi umur manfaat dari suatu aset tidak berwujud. Jika entitas tidak dapat menetapkan pola yang andal, maka entitas harus menggunakan metode garis lurus dengan nilai residu diasumsikan sama dengan nol.

PT Saptawira tidak dapat mengestimasi umur manfaat dan menetapkan pola yang andal untuk menentukan metode amortisasi karena aset tidak berwujud perusahaan diperoleh sebagai hibah dari perusahaan related parties. Oleh karena itu, amortisasi yang dilakukan oleh perusahaan di tahun setelah pengakuan awal (tahun 2010) mengacu pada SAK ETAP yaitu dengan metode garis lurus dengan nilai residu nol dan umur manfaat 10 tahun.

Jurnal untuk mencatat Amortisasi tahun 2010:

| | | |
|--------------------------------|------|------|
| Beban Amortisasi | | (Dr) |
| Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (Cr) | |

Penyesuaian atas amortisasi aset tidak berwujud di tahun 2010 ini akan mempengaruhi jumlah pos aset tidak berwujud dalam Neraca dan jumlah beban amortisasi pada Laporan Laba Rugi.

Laporan Keuangan Komparatif Perusahaan Untuk Tahun 2009 dan 2010 Setelah Penerapan SAK ETAP

PT SAPTAWIRA ADHITAMA TOUR & TRAVEL
NERACA
Per 31 Desember 2010 dan 2009

(Dalam Rupiah)

| KETERANGAN NO. ASET | CATATAN | 31-12-2010 | 31-12-2009 |
|-------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|
| ASET LANCAR: | | | |
| Kas dan setara kas | | 1.856.047.501 | 2.803.290.710 |
| Piutang usaha | | 4.068.165.528 | 2.717.981.594 |
| Piutang Hubungan Istimewa | | 45.680.725 | 864.863.310 |
| Piutang lain-lain | | - | - |
| Piutang Karyawan | | 74.250.000 | 65.347.600 |
| Jumlah Aset Lancar | | <u>6.044.143.754</u> | <u>6.451.483.214</u> |
| ASET TIDAK LANCAR: | | | |
| Aset tetap (Nilai Tercatat) | | 5.650.659.941 | 5.589.820.879 |
| Uang Jaminan | | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Deposito Jaminan | | 87.500.000 | 110.000.000 |
| Aset Tidak Berwujud | | 146.383.200 | 162.648.000 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | | <u>5.889.543.141</u> | <u>5.867.468.879</u> |
| JUMLAH ASET | | <u>11.933.686.895</u> | <u>12.318.952.093</u> |
| KEWAJIBAN LANCAR | | | |
| Hutang Usaha | | 3.375.647.764 | 2.083.659.336 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | | 1.382.537.660 | 2.304.071.927 |
| Hutang Bank | | 1.009.376.453 | 1.743.798.347 |
| Hutang Sewa | | 82.953.500 | 246.163.000 |
| Uang Muka | | 275.340.082 | 141.880.350 |
| Biaya Yang Masih Harus Dibayar | | - | 2.009.700 |
| Hutang pajak | | 23.550.446 | 47.786.143 |
| Jumlah Kewajiban Lancar | | <u>6.149.405.905</u> | <u>6.569.368.803</u> |
| KEWAJIBAN TIDAK LANCAR | | | |
| Hutang Sewa | | 69.837.000 | 49.156.000 |
| Hutang Bank | | 1.992.750.000 | 2.421.750.000 |
| Jumlah Kewajiban Tidak Lancar | | <u>2.062.587.000</u> | <u>2.470.906.000</u> |
| Jumlah Kewajiban | | <u>8.211.992.905</u> | <u>9.040.274.803</u> |
| EKUITAS | | | |
| Modal Disetor | | 200.000.000 | 200.000.000 |
| Tambahan Modal Disetor | | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Laba Ditahan | | 3.121.693.990 | 2.678.677.290 |
| Jumlah Ekuitas | | <u>3.721.693.990</u> | <u>3.278.677.290</u> |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | <u>11.933.686.895</u> | <u>12.318.952.093</u> |

PT SAPTAWIRA ADHITAMA TOUR & TRAVEL
LAPORAN LABA RUGI
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2010 dan 2009
 (Dalam Rupiah)

| KETERANGAN NO. | CATATAN | TAHUN 2010 | TAHUN 2009 |
|---------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| PENDAPATAN | | 139.165.676.669 | 112.944.906.966 |
| HARGA POKOK PENJUALAN | | (133.483.378.818) | (108.301.000.612) |
| LABA KOTOR | | 5.682.297.851 | 4.643.906.354 |
| BEBAN USAHA | | (5.362.849.366) | (4.625.808.457) |
| LABA USAHA | | 314.448.485 | 18.097.897 |
| PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN | | | |
| Pendapatan Lain-lain | | 1.008.556.529 | 644.335.391 |
| Beban Lain-lain | | (776.591.814) | (514.012.789) |
| Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain | | 231.964.715 | 130.322.602 |
| LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | | 51.413.200 | 148.420.499 |
| MANFAAT (BEBAN) PAJAK: | | | |
| Pajak Kini | | (108.396.500) | (3.608.350) |
| Pajak Tangguhan | | - | - |
| LABA BERSIH | | 443.016.700 | 144.812.139 |

PT SAPTAWIRA ADHITAMA TOUR & TRAVEL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2010 dan 2009
 (Dalam Rupiah)

| Modal | Tambahkan Keterangan | Saham | Modal Disetor | Laba Ditahan | Jumlah |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Saldo Awal 1 Januari 2009 | | 200.000.000 | 400.000.000 | 2.397.732.871 | 2.997.732.871 |
| Laba Tahun Berjalan | | - | - | 144.812.139 | 144.812.139 |
| Pengakuan Aset | | - | - | 162.648.000 | 162.648.000 |
| Penyesuaian PPh | | - | - | (26.515.720) | (26.515.720) |
| Saldo Akhir 31 Des 2009 | 200.000.000 | 400.000.000 | 2.678.677.290 | 3.278.677.290 | |
| Saldo Awal 1 Januari 2010 | | 200.000.000 | 400.000.000 | 2.678.677.290 | 3.278.677.290 |
| Laba Tahun Berjalan | | - | - | 443.016.700 | 443.016.700 |
| Saldo Akhir 31 Des 2010 | 200.000.000 | 400.000.000 | 3.121.693.990 | 3.721.693.990 | |

PT SAPTAWIRA ADHITAMA TOUR & TRAVEL
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2009
(Dalam Rupiah)

| KETERANGAN | TAHUN 2010 | TAHUN 2009 |
|--|------------------------|------------------------|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | |
| Laba Tahun Berjalan | 443.016.700 | 144.812.139 |
| Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi kas bersih yang diperoleh dari (digunakan dalam) aktivitas operasi: | | |
| Beban Penyusutan Aset Tetap | 372.230.378 | 414.935.113 |
| Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 16.264.800 | - |
| Laba Operasional Sebelum Perubahan Modal Kerja | 831.511.878 | 559.747.252 |
| Perubahan Modal Kerja: | | |
| Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi: | | |
| Piutang usaha | (1.350.183.934) | (873.999.476) |
| Piutang Hubungan Istimewa | 819.182.585 | (864.863.310) |
| Piutang lain-lain | - | 47.145.000 |
| Biaya Dibayar Dimuka | - | - |
| Jumlah Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi | (531.001.349) | (1.691.717.786) |
| Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Operasi: | | |
| Hutang Usaha | 1.291.988.428 | (2.681.563.547) |
| Pendapatan Diterima Dimuka | (921.534.267) | 2.304.071.927 |
| Penyesuaian Beban Pajak Penghasilan | - | (26.515.720) |
| Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Operasi | 370.454.161 | (404.007.340) |
| KAS DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI | 670.964.690 | (1.535.977.874) |
| Perpajakan: | | |
| Hutang Pajak | (24.235.697) | 24.010.114 |
| ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI | 646.728.993 | (1.511.967.760) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | |
| Penurunan (Kenaikan) Aset Tetap: | | |
| Penambahan Aset Tetap | (554.569.440) | (163.345.000) |
| Pengurangan Aset Tetap | 121.500.000 | 402.000.000 |
| Akumulasi Penyusutan | - | (268.711.443) |
| Deposito Jaminan | 22.500.000 | (36.250.000) |
| ARUS KAS BERSIH DIGUNAKAN DALAM AKTIVITAS INVESTASI | (410.569.440) | (66.306.443) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN | | |
| Penurunan (Kenaikan) Aset: | | |
| Piutang Karyawan | (8.902.400) | (8.057.700) |
| Jumlah Penurunan (Kenaikan) Aset | (8.902.400) | (8.057.700) |
| Kenaikan (Penurunan) Kewajiban: | | |
| Uang Muka | 133.459.732 | (95.145.470) |
| Hutang Bank-Jangka Pendek | (734.421.894) | 1.392.652.649 |
| Hutang Sewa-Jangka Pendek | (163.209.500) | 57.071.800 |
| Biaya Yang Masih Harus Dibayar | (2.009.700) | 2.009.700 |
| Hutang Sewa-Jangka Panjang | 20.681.000 | (134.866.000) |
| Hutang Bank-Jangka Panjang | (429.000.000) | (448.250.000) |
| Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kewajiban | (1.174.500.362) | 773.472.679 |
| ARUS KAS BERSIH DIGUNAKAN DALAM AKTIVITAS PEMBIAYAAN | (1.183.402.762) | 765.414.979 |
| JUMLAH KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH | (947.243.209) | (812.859.224) |
| KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN | 2.803.290.710 | 3.616.149.934 |
| KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN | 1.856.047.501 | 2.803.290.710 |

Pengungkapan Komponen yang Terpengaruh SAK ETAP dalam Catatan atas Laporan Keuangan Perusahaan

SAK ETAP meminta suatu perusahaan mengungkapkan informasi secara komparatif dengan periode sebelumnya secara naratif dan deskriptif secara relevan. Semua ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan yang relevan dibuat dalam catatan laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Entitas atau perusahaan harus mengungkapkan hal berikut dalam laporan keuangan: (1) Suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan terhadap SAK ETAP dalam catatan atas laporan keuangan; (2) Domisili dan bentuk hukum, serta alamat kantor terdaftar; (3) Penjelasan sifat operasi dan aktivitas utamanya; (4) Dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan; dan (5) Informasi lain yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan dan informasi tambahan yang relevan dalam memahami laporan keuangan.

PENUTUP

Berdasarkan penerapan SAK ETAP, pelaporan keuangan UMKM atau entitas yang belum memiliki akuntabilitas publik akan lebih mudah dibaca dan dipahami oleh para penanam modal, baik yang berasal dari lembaga keuangan, bank ataupun lembaga lain. Hal ini akan membuat perusahaan menjadi lebih mampu untuk berkembang dan memperluas operasi bisnisnya. Langkah-langkah yang harus ditempuh entitas dalam menerapkan standar ini adalah penerapan bersifat prospektif, berupa: (1) membuat Neraca Awal perusahaan dengan mengakui dan tidak mengakui Aset dan Kewajiban yang dipersyaratkan dalam SAK ETAP, mereklasifikasikan pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas berdasarkan SAK ETAP; (2) penyesuaian yang diperlukan dalam membuat Neraca Awal dan yang muncul dari transaksi, kejadian, atau kondisi lainnya sebelum tanggal efektif SAK ETAP, diakui secara langsung di pos Saldo Laba pada tanggal penerapan SAK ETAP; dan (3) menerapkan SAK ETAP dalam pengukuran seluruh komponen Laporan Keuangan perusahaan pada tahun penerapan SAK ETAP.

Pengaruh dari mengimplementasikan SAK ETAP pada laporan keuangan perusahaan PT Saptawira Adhitama Tour & Travel adalah: (1) Saldo Laba, akibat adanya pengakuan Aset dan penyesuaian lain yang muncul dari transaksi, kejadian, atau kondisi lainnya sebelum tanggal efektif SAK ETAP, maka nilai Saldo Laba perusahaan pada Neraca Awal penerapan SAK ETAP menjadi lebih tinggi dari sebelumnya; (2) Pendapatan, akibat adanya penerapan kewajiban secara akrual dapat menyebabkan munculnya pos Pendapatan Diterima Dimuka. Pos ini merupakan Pendapatan Usaha yang memenuhi syarat diakui sebagai kewajiban perusahaan. Hal ini mengakibatkan Pendapatan Usaha pada Laporan Laba Rugi perusahaan menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Pendapatan (PPN) yang telah dikeluarkan dari Pendapatan Usaha perusahaan juga mengakibatkan Pendapatan usaha perusahaan menjadi lebih rendah; (3) Pihak-pihak Istimewa, adanya penyajian secara terpisah dari transaksi dengan pihak-pihak istimewa yang menimbulkan pos Piutang Hubungan Istimewa pada Neraca perusahaan. Hal ini membuat penyajian dan pengungkapan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa menjadi sesuai seperti yang disyaratkan dalam SAK ETAP.

Saran

Berikut ini merupakan beberapa saran yang diusulkan dalam hubungannya dengan kelanjutan proses implementasi SAK ETAP pada masa yang akan datang. Untuk memperkuat kesimpulan mengenai langkah-langkah penerapan awal SAK ETAP, akan lebih baik jika penelitian dilakukan pada jenis usaha atau industri yang berbeda khususnya bidang usaha yang memiliki keunikan tersendiri dalam pencatatan akuntansinya untuk dibahas lebih dalam dan lengkap. Ini dapat membuat penelitian lebih dapat diterapkan tidak hanya pada bidang industri jasa perjalanan wisata melainkan industri lainnya.

Dalam menganalisis laporan keuangan, akan lebih baik jika pencatatan transaksi laporan keuangan yang diambil lebih dari satu tahun, terutama pencatatan transaksi setelah tanggal efektif dari SAK ETAP. Hal ini dapat memungkinkan peneliti untuk membandingkan kinerja perusahaan dan menganalisis dampak dari penerapan SAK ETAP bagi UMKM atau entitas yang belum memiliki akuntabilitas publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan (2009). *Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan (2009). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Komunitas Keuangan LSM (2010). *Perbedaan SAK ETAP dengan PSAK*. <http://www.keuanganlsm.com/2010/10/21/perbedaan-sak-etap-dengan-psak/>. Diakses tanggal 14 Februari 2011.
- Lam, N. & Lau, P. (2009). *Intermediate Financial Reporting*. Singapore: McGraw-Hill.
- Short, D., Libby, P., & Libby, R. (2007). *Financial Accounting: A Global Perspective* (5th ed.). USA: McGraw-Hill.
- Weygandt, J., Kieso, D., & Kimmel, P. (2011). *Financial Accounting* (IFRS ed.). USA: John Wiley & Sons.